

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018**

***THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL TAXES AND
REGIONAL LEVIES ON THE REGIONAL OWN REVENUE (PAD) OF
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE IN 2014-2018***



OLEH

IRWAN DANA
NIM : 216120174

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018

THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL LEVIES ON THE REGIONAL OWN REVENUE (PAD) OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE IN 2014-2018

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

IRWAN DANA
NIM : 216120174

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018**

OLEH :

IRWAN DANA

216120174

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 07 Februari 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN.0830016101

Pembimbing II

Sultan Hadi, S.E., M.M
NIDN. 0813038202

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

Ketua

Lalu Hendri Maniza, S.Sos. MM
NIDN.082810840

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018

OLEH :

IRWAN DANA
216120174

Naskah skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang
diselenggarakan :
Mataram 07 Februari 2020

Dinyatakan Telah Dapat Diterimah Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) Diprogram Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tim Penguji

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN.0830016101

Sulhan Hadi, S.E., M.M
NIDN. 0813038202

Selva, S.E., M.Sc
NIDN.0811113601



Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. N. Muhammad Ali, M.Si.
0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IRWAN DANA

NIM : 216120174

Judul Skripsi : “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 15 Februari 2020

Penulis,



Irwan Dana

Nim. 216120174



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN DANA
NIM : 216 120 174
Tempat/Tgl Lahir : Langgam, 09-11-1997
Program Studi : Adm-Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081 909 602 708
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Peribasi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2014-2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15-02-2020

Penulis



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Penulis berasal dari Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan lahir di Langam pada tanggal 9 November 1997, sebagai putra ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Azhar dan Ibu Sukma. Penulis menempuh pendidikan Sekolah dasar di SDN 2 Langam masuk pada tahun 2004 lulus pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lopok lulus pada tahun 2013 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah atas di SMAN 1 Lape lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi swasta dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO

“ Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung “. (QS. Ali Imran : 73)

“ Every day, every hour turn the pain into power “

“ Tuhan pasti akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa “



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

Bapak dan ibu yang saya sayangi,

Dengan segala kasih sayangnya yang tak ternilai dengan apapun.

Serta berkat doa dan restunya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti dan membahagiakan kalian.



ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018

Oleh :

Irwan Dana
Nim: 216120174

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 yang diperoleh di kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan laporan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah, dan sumber PAD paling dominan adalah pajak daerah. Hal tersebut terlihat dari hasil pemungutan pajak daerah yang hampir mencapai target. Pada tahun 2014 pemungutan pajak daerah terendah sebesar 93,87 %, dan tahun 2017 pemungutan pajak tertinggi mencapai 103,18% dan melebihi target. Sedangkan untuk retribusi daerah tahun 2014 menjadi yang tertinggi dengan mencapai 143,17% yang artinya melebihi target, pada tahun 2018 menjadi yang terendah mencapai 35,76%. Dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 – 2018.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

**THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL TAXES AND
REGIONAL LEVIES ON THE REGIONAL OWN REVENUE (PAD) OF
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE IN 2014-2018**

by:

Irwan Dana
Nim: 216120174

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of regional taxes and local user fees which are the authority of the provincial government on the original revenue of the West Nusa Tenggara Province in the period of 2014 - 2018. The method used in this study is the quantitative method. This type of research is descriptive quantitative using secondary data in the form of a report on the realization of regional taxes and levies in West Nusa Tenggara Province in 2014 - 2018. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies by collecting data relating to local taxes and the West Nusa Tenggara Province regional retribution in 2014 - 2018 obtained at the West Nusa Tenggara Province Regional Revenue Management Agency (BAPPENDA) office and the realization of the West Nusa Tenggara Province regional tax and retribution in 2014 - 2018.

The results of this study indicate that regional taxes and levies are the source of original regional income, and the most dominant source of PAD is the regional taxes. This can be seen from the results of local tax collection that almost reached the target. In 2014 the lowest local tax collection was 93.87%, and in 2017 the highest tax collection reached 103.18% and exceeded the target. As for regional retribution, in 2014 was the highest with 143.17%, which means it exceeded the target, in 2018 the lowest reached 35.76%. It can be said that local taxes and local user charges have a very significant influence on the increase in PAD of West Nusa Tenggara Province in 2014 - 2018.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution and Local Original Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018”**. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Bisnis (S.AB). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik UMMAT.
- 3) Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM selaku Prodi Administrasi Bisnis Fisipol UMMAT.
- 4) Bapak Drs. Mintasrihardi, M.H. selaku dosen pembimbing 1
- 5) Bapak Sulhan Hadi, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing II
- 6) Ibu Selva, S.E.,M.Sc, selaku dosen penguji netral
- 7) Seluruh Dosen dan staff Prodi Administrasi Bisnis Fisipol UMMAT yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami.
- 8) Kepada Kedua Orang Tua serta keluarga yang selalu mendoakan dan mensupport saya.
- 9) Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karna terbatasnya kemampuan dan pengalaman saya.

Oleh karna itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Mataram , 11 Februari 2020

IRWAN DANA

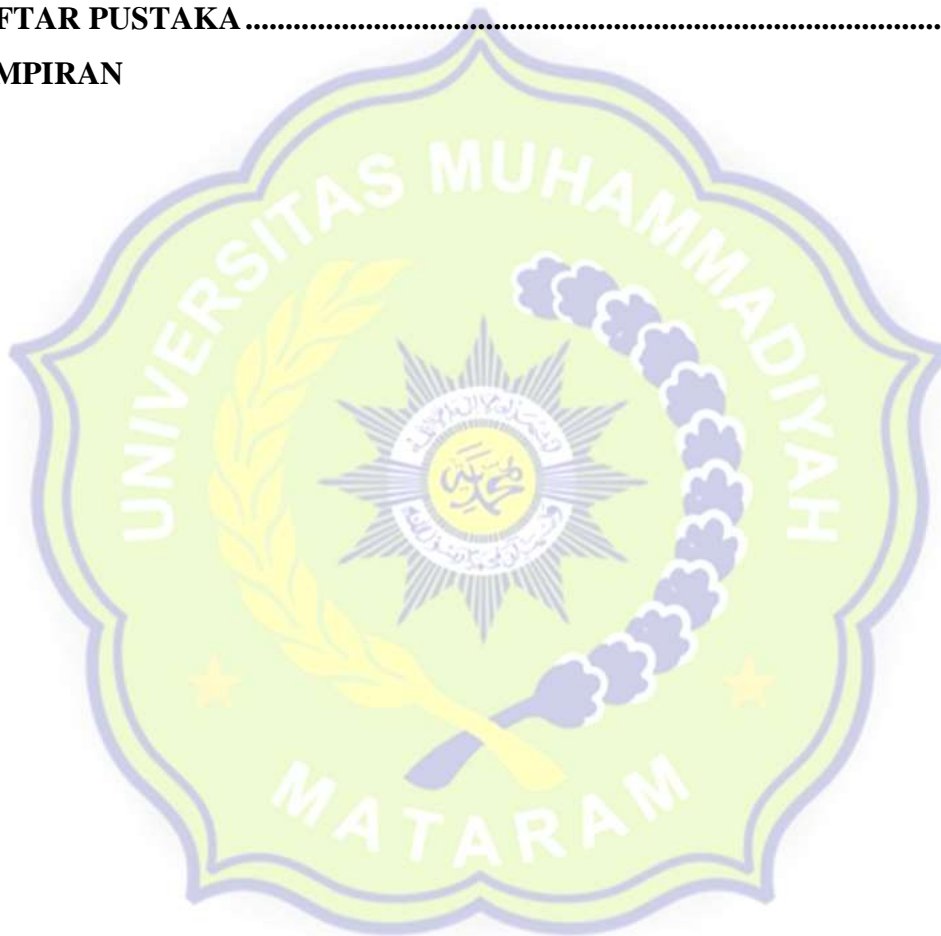


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Batasan Masalah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Pendapat Asli Daerah	11
2.2.2 Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	13
2.2.3 Pajak Daerah	14
2.2.4 Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya.....	15
2.2.5 Retribusi Daerah	16
2.2.6 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD	18
2.3 Kerangka Berfikir.....	19
2.4 Hipotesis Penelitian.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 Jenis Penelitian.....	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.4.1 Jenis Data	22
3.4.2 Sumber Data.....	22
3.5 Defenisi Operasional Variabel	23
3.5.1 Variabel Independen	23
3.5.2 Variabel Dependen.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1 Studi Pustaka.....	23
3.6.2 Studi Dokumentasi	23
3.7. Teknik Analisis Data.....	24
3.7.1 <i>Time Series Analysis</i>	24
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	24
3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda	26
3.7.4 Uji Hipotesis	27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Penelitian	29
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian	29
4.1.2 Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat	31
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	31
4.2.1 Perkembangan Variabel	31
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
4.2.3 Pajak Daerah	34
4.2.4 Retribusi Daerah.....	35
4.3 Analisis Data	36
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	39
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
4.3.3 Uji Hipotesis	43

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	48
4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD	48
4.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD	48
4.4.3 Pengaruh Variabel Paling Dominan Terhadap PAD.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi di daerahnya (Mentayani dkk, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomis bagi daerah tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Mentayani dkk, 2014).

Nusa Tenggara Barat salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki dataran rendah berupa pantai dan dataran tinggi berupa perbukitan. Hal ini menjadikan Nusa Tenggara Barat memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah cukup besar.

Dalam perekonomian ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

Gambar Grafik 1.1 Pendapatan pajak daerah Nusa Tenggara Barat 2008-2018



Sumber : BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendapatan pajak Nusa Tenggara Barat dari tahun 2008 terus meningkat sampai dengan 2018 dari masing-masing komponen pajak yaitu pendapatan dari pajak rokok 26,28%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 17,19%. Rp 362 miliar target pajak kendaraan bermotor Tahun 2018, terealisasi 106,9 % atau Rp 387 miliar lebih. Realisasi pajak kendaraan bermotor melebihi target sebesar Rp 25 miliar lebih. Begitu juga dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dari target Rp 350 miliar pada 2018, realisasinya sampai Desember Rp 357 miliar atau 101,9%. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melebihi target sekitar Rp 7 miliar.

Pendapatan Pajak Daerah 2008-2018

No	Tahun	Miliar Rupiah	
		Target	Realisasi
1.	2008	294.298	348.568
2.	2009	356.327	369.172
3.	2010	393.525	391.690
4.	2011	478.077	506.909
5.	2012	555.167	580.615
6.	2013	673.234	697.834
7.	2014	963.903	904.783
8.	2015	1.008,65	1.010.65
9.	2016	1.037.54	1.003.65
10.	2017	1.114.45	1.180.80
11.	2018	1.272.29	1.272

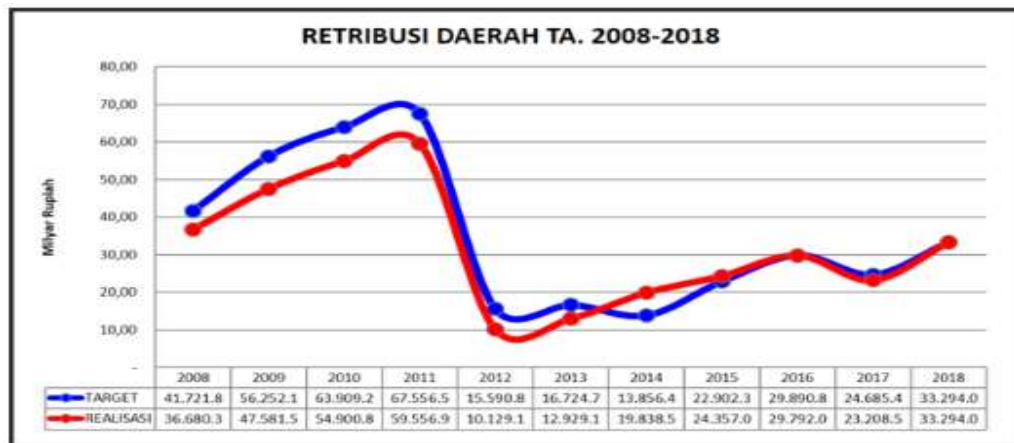
Sumber : BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menurut UU NO.28 Tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah ini memberlakukan sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Sunarto dan Fatimah, 2016). Jadi retribusi daerah sangat

beperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pemerintah.

Gambar Grafik 1. Retribusi Daerah tahun 2008-2018



Sumber : BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pendapatan paling signifikan pada tahun 2008-2011, peningkatan terjadi disebabkan karna pemungutan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Manambai Abdul Khadir di Kabupaten Sumbawa masih menggunakan pola pengelolaan retribusi daerah. Tahun 2012 pendapatan retribusi daerah mulai turun karna disebabkan Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Menambai Abdul Khadir di Kabupaten Sumbawa berubah pola pengelolaan menjadi pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Dari grafik pendapatan retribusi daerah diatas, salah satu penyebab realisasi dari target retribusi tidak tercapai yaitu disektor seperti cetak peta kurangnya sosialisasi serta mesin yang digunakan masih kalah dengan swasta, penginapan-penginapan tidak mencapai target karna kurangnya promosi, Pemakaian kekayaan daerah seperti sewa tanah dan bangunan kurang strategis dijadikan tempat usaha.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2008-2018

No	Tahun	Miliar Rupiah	
		Target	Realisasi
1.	2008	41.721.8	36.680.3
2.	2009	56.252.1	47.581.5
3.	2010	63.909.2	54.900.8
4.	2011	67.556.5	59.556.9
5.	2012	15.590.8	10.129.1
6.	2013	16.724.7	12.929.1
7.	2014	13.856.4	19.838.5
8.	2015	22.902.3	24.357.0
9.	2016	29.890.8	29.797.0
10.	2017	24.685.4	23.208.5
11.	2018	33.294.0	33.294.0

Sumber : BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Maka dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 ?
3. Manakah pengaruh paling dominan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh paling dominan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang terkait faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal menentukan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang, maka penulis hanya menitikberatkan pada kewenangan Provinsi dalam pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2014-2018.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Nama, Judul Tahun Penelitian	Metode	Temuan	Perbedaan
Kusuma dan Wirawati, “Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Bali” (2013)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk	Penelitian sekarang membahas tentang “analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan penelitian ini membahas “Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di

		retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kabupaten/Kota Bali
Ashmad Waluya Jati “ Peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah” Tahun 2008	Kuantitatif	peranan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten / kota di Jawa timur cukup dominan	Penelitian sekarang membahas tentang “analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018
Dian Maya Sari “kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa timur” Tahun 2007	Kuantitatif	Hasil penelitian menurut analisis statistik deskriptif bahwa pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah.	Penelitian sekarang membahas tentang “analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015: 281).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Sunanto, 2015).

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. menurut pasal 6 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau oleh jasa.

Suriadinata (1994) menyatakan bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor, antara lain :

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.

3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

2.2.2 Perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Pengesahan UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar dibidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memeperkuat otonomi daerah.

3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.3 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005). Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perauran perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

Menurut UU NO.28 Tahun2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak Provinsi meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jenis pajak provinsi bersifat *limitative* yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah. Namun dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai (Prawoto, 2011).

2.2.4 Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya

Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *tatbestan* (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut ini apabila *tatbestan* sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak fiskus.

Dalam kaitannya dengan *self assessment* wajib pajak yang mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

hutang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut :

- a. Pembayaran/Pelunasan
- b. Kompensasi
- c. Penghapusan Hutang
- d. Daluwarsa
- e. Pembebasan

2.2.5 Retribusi Daerah

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui undang-undang No.28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU

No.18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama dari retribusi daerah.

Tabel 2.1
Pengelompokan retribusi daerah

No.	Retribusi jasa umum	Retribusi jasa usaha	Retribusi tertentu	Retribusi perizinan
1.	Retribusi pelayanan kesehatan	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Retribusi mendirikan bangunan	
2.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Retribusi pasar grosir/pertokoan	Retribusi tempat penjualan minuman berakohol	
3.	Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan catatan sipil	Retribusi tempat pelelangan	Retribusi izin gangguan	
4.	Retribusi pelayanann pemakaman	Retribusi terminal	Retribusi perizinan	
5.	Retribusi parkir di tepi jalan umum	Retribusi tempat khusus parker		
6.	Retribusi pelayanan pasar	Retribusi tempat penginapan		
7.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi penyedotann kakus		
8.	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Retribusi rumah potong hewan		
9.	Retribusi penggantian	Retribusi		

	biaya cetak peta	pelayanan pelabuhan kapal	
10.	Retribusi pengujian kapal perikanan	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	
11.		Retribusi penyebrangan diatas air	
12.		Retribusi pengolahan limbah cair	
13.		Retribusi penjualan produksi usaha daerah	

Sumber : (Siahan, 2005)

Penetapan retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

2.2.6 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi

peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan (Mentayani, Ida dkk.2014).

2. Retribusi Daerah

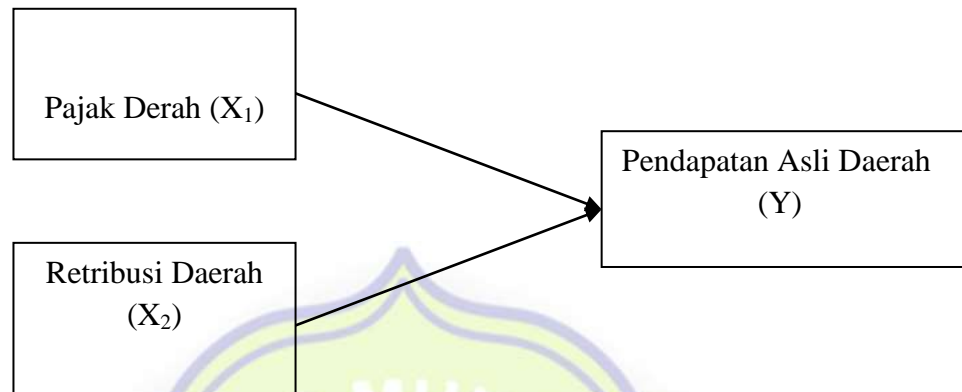
Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan (Mentayani, Ida dkk.2014).

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah

dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.



Keterangan :

X_1 : Pajak Daerah

X_2 : Retribusi Daerah

Y : Pendapatan Asli Daerah

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu :

H_1 : Diduga pendapatan pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.

H_2 : Diduga pendapatan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan metode yang menyandarkan diri pada metode ilmiah. Pendekatan ini ditetapkan mengingat data yang digunakan berupa data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu usaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah, khususnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu kegiatan pada wilayah tertentu.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Objek penelitian skripsi ini adalah kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2014-2018). Data-data

yang menyangkut objek penelitian ini diperoleh dari BAPPENDA (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Waktu penyusunan skripsi ini berlangsung selama satu bulan lebih, mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2018 untuk data nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. data-data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah pihak pengumpul data primer serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi, dianalisis dan disajikan dalam bentuk informasi. Sumber data penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Nusa Tenggara Barat.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen, yaitu variable yang menjadi sebab terjadinya/ pengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel independen.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel dependen, karena dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

3.6.2 Studi Dokumentasi

Penelitian ini menghimpun data yang telah terdokumentasi serta terpublikasi, yakni laporan realisasi pendapatan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Time series Analysis

Analisis ini pada hakikatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu, pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan (*central tendency*) dari suatu gejala atau kejadian. Data akan dianalisa dalam metode *time series* ini adalah data-data mengenai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi data-data pajak daerah dan retribusi daerah.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran asumsi klasik ekonometrika maka dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik ekonometrika yaitu Normalitas Data, Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan distribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali, 2005). Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut (Santoso, 2011), pada umumnya jika nilai VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Priyatno, 2008). Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(2-dL)$, maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak autokorelasi.
- c. Jika d terletak diantara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat grafik plot antara prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SPRESID (Ghozali, 2005).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Mengacu pada hipotesis yang diajukan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang berguna untuk menguji apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model pengaruh paling signifikan terhadap variabel terikat.

Rumus regresi linier berganda menurut (Sugiyono, 2011) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

b₁: Koefesien regresi

b₂: Koefesien regresi

X₁ : Variabel Pajak Daerah

X₂: Variabel Retribusi Daerah

e : Tingkat kesalahan pengganggu/eror

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel dependen.

2. Uji f

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai f hitung lebih besar dari f tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen (Ghozali, 2011).

3. Uji R^2

Koefesien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable-variabel dependen (Ghozali, 2011).

